

**PERAN YELLOW CLINIC TERHADAP PERCEPATAN
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK
MEWUJUDKAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana Strata 2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

G. AYU AMELINDA HANJANI

NIM: 19C20029

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

PERAN YELLOW CLINIC TERHADAP PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT

Oleh: G. Ayu Amelinda Hanjani

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bencana nonalam yang ditetapkan oleh presiden. Berbagai upaya penanggulangan pandemi dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang timbul akibat infeksi Covid-19 termasuk upaya pencegahan melalui vaksinasi. Percepatan vaksinasi menjadi suatu urgensi yang harus segera dilakukan di Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus membentuk kekebalan komunitas (*herd-immunity*). Pada pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya dukungan tenaga kesehatan, sarana dan fasilitas hingga penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat untuk menimbulkan kepatuhan terhadap pelaksanaan vaksinasi. Upaya penanggulangan wabah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan seluruh warga negaranya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemenuhan hak kesehatan pada masyarakat melalui pelaksanaan vaksinasi dan peran serta fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi dan membentuk kekebalan komunitas pada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi dekritif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Ketua Yayasan Cipta Karya Medika dan Penanggung Jawab Yellow Clinic. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi pada peraturan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kurang efektifnya pelaksanaan vaksinasi gotong royong disebabkan oleh materi muatan pada peraturan terkait, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Serta kurangnya dukungan sarana dan fasilitas penunjang agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik pada masyarakat. Perlunya peran dari pihak swasta dan *stakeholder* untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan vaksinasi sehingga capaian *herd-immunity* dapat segera terealisasi dan hak kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.

Kata kunci: hak kesehatan masyarakat, percepatan vaksinasi, Covid-19, peran swasta

ABSTRACT

THE ROLE OF YELLOW CLINIC IN ACCELERATING THE IMPLEMENTATION OF COVID-19 VACCINATION TO ACTUALIZE PUBLIC HEALTH RIGHTS

By: G. Ayu Amelinda Hanjani

The Covid-19 pandemic in Indonesia is a non-natural disaster designated by the president. Various efforts to deal with the pandemic have been carried out to overcome health problems arising from Covid-19 infection, including prevention efforts through vaccination. Acceleration of vaccination has become an urgency that must be carried out immediately in Indonesia to provide protection to the community while at the same time forming herd-immunity. In its implementation, various obstacles were found, such as the lack of support from health workers, facilities and amenities to the delivery of effective information to the public to generate compliance with the implementation of vaccinations. Efforts to deal with epidemics are the responsibility of the government in fulfilling the health rights of all its citizens. This study aims to find out about the fulfillment of the right to health in the community through the implementation of vaccination and the role and participation of private health service facilities in accelerating the implementation of the Covid-19 vaccination to assist the government in overcoming the pandemic and forming herd-immunity.

This research was conducted in DKI Jakarta Province. This study uses a socio-legal juridical approach with descriptive-analytical specifications. The data used in the research were primary and secondary data obtained through interviews with the Coordinating Minister for the Economic Affairs, the Vice Chairperson of the House Commission IX of the Republic of Indonesia, South Jakarta Health Sub-Department, the President of Cipta Karya Medika Foundation and the Medical Manager of Yellow Clinic. The data from the research were analyzed using qualitative methods.

The results of the research indicate that there is disharmony in the implementation of regulations for Covid-19 vaccination. The ineffectiveness of the implementation of gotong royong vaccination due to the content of the relevant regulations, so the implementation is not optimal. The lack of support for facilities and supporting facilities so that policies can be implemented properly in the community. The role of private sector and stakeholders are needed to assist the government in accelerating the implementation of vaccinations so herd-immunity can be realized immediately and public health rights can be fulfilled.

Keywords: public health rights, acceleration of vaccination, Covid-19, role of private sector